



Pemerintah  
Kabupaten Lamongan

# LKjIP TAHUN 2021

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Mastrip No. 61 Lamongan – 62216

(telp) 0322-321170

email : [pubmrg@lamongankab.go.id](mailto:pubmrg@lamongankab.go.id)

website : [lamongankab.go.id](http://lamongankab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2021 pada dasarnya merupakan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) yaitu gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Kebinamargaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, 28 Januari 2022

. KEPALA DINAS PU BINA MARGA  
KABUPATEN LAMONGAN



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	3
C. Data Umum Organisasi.....	17
D. Sistematika Penyajian LKjIP .....	21
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>22</b>
A. Rencana Strategis .....	22
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	24
Program Dan Kegiatan	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>31</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
A.1 Pencapaian Kinerja .....	31
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja .....	32
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai akhir Periode RPJMD/RENSTRA .....	33
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .....	35
A.5 Alisis Penyebab Keberhasilan yang telah di lakukan .....	35
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	36
A.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja.....	36
B. Realisasi anggaran .....	37
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51



**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021
- Perjanjian Kinerja 2021



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan selama Tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2021 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 102,39% dan 101,43%.



Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor : XI/ MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta



pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan berperan pada bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan. Arah Kebijakan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2016 - 2021 diimplementasikan dalam program prioritas sebagai berikut :

- a. Menjaga kemantapan kondisi jalan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan klasifikasi dan kualitas jalan untuk mendukung pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan secara adil dan merata.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan , maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

**Landasan Hukum :**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan;



4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

**Tujuan :**

Sesuai dengan perkembangan perekonomian dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan yang bernuansa multidimensional, maka diperlukan manajemen pembangunan yang lebih memadai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran lalu lintas dalam rangka mendukung kegiatan Perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas pedesaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan .
3. Meningkatkan kondisi dan fungsi jalan dan jembatan,.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan

## **B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub Bidang Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

### **1. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, terdiri dari :



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi;
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Jalan membawahi;
  - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
  - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan.
4. Bidang Pengelolaan Jembatan membawahi;
  - a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jembatan;
  - b. Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Rutin Jembatan.
5. Bidang Sarana Prasarana Kebinamargaan membawahi:
  - a. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
  - b. Seksi Leger, Inpeksi Jalan Dan Jembatan;
  - c. Seksi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi. Jalan dan Jembatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Tugas pokok dan Fungsi :

1. **Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki fungsi :**
  - a. perencanaan strategis dan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
  - b. pembinaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga;
  - c. pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum bina marga;
  - d. penyelenggaraan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga;
  - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum bina marga;
  - f. pembinaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum bina marga;
  - g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. **Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.



1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
  - e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
  - g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
  - h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
  - i. melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
  - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penyiapan dan organisasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas,
  - b. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan, formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja , pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, Sumpah/ janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standart kopentensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional, dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan lainnya,
  - c. Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai dinas;
  - d. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan
  - e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah – naskah dinas;
  - f. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan , administrasi, perjalanan dinas dan keprotokolan
  - g. Melaksanakan tatalaksana, tata usaha arsip dan perpustakaan;
  - h. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
  - i. Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah
  - j. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik dan
  - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**3. Bidang Pengelolaan Jalan merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.**

Bidang Pengelolaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan, serta pemeliharaan rutin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Jalan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
  - b. perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
  - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
  - d. penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan; dan
  - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan /atau Peningkatan Jalan;
    - b. mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;
    - c. melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;
    - d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;



- e. menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;
  - f. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
  - b. mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala jalan;
  - c. melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
  - d. melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
  - e. menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
  - f. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
  - b. menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
  - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin;



- d. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
- e. menyusun pemutakhiran program pemeliharaan rutin jalan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
- g. melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam jalan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Pengelolaan Jembatan merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas**

Bidang Pengelolaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jembatan, serta pemeliharaan rutin jembatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- b. perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- d. penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan



- pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jembatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
  - b. mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
  - c. melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
  - d. melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
  - e. menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
  - f. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Gorong-gorong;
  - b. mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala jembatan dan gorong-gorong;



- c. melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong;
  - d. melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong;
  - e. menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong ;
  - f. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemeliharaan Rutin Jembatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dan gorong-gorong;
  - b. menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dan gorong-gorong;
  - c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong secara rutin;
  - d. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
  - e. menyusun pemutakhiran program pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
  - g. melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam Jembatan;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**5. Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Sarana dan Prasarana jalan;
  - b. pengawasan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan termasuk manajemen pengelolaannya;
  - d. pengendalian pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan;
  - e. penyelenggaraan kegiatan lainnya yang terkait Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan; dan
  - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 
1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
    - a. menyusun rencana teknis Peralatan dan Perlengkapan kebinamargaan;
    - b. perencanaan kebijakan program Peralatan dan Perlengkapan;
    - c. pelaksanaan program dan kegiatan peralatan dan perlengkapan;
    - d. pembinaan monitoring dan evaluasi pengendalian peralatan dan perlengkapan;



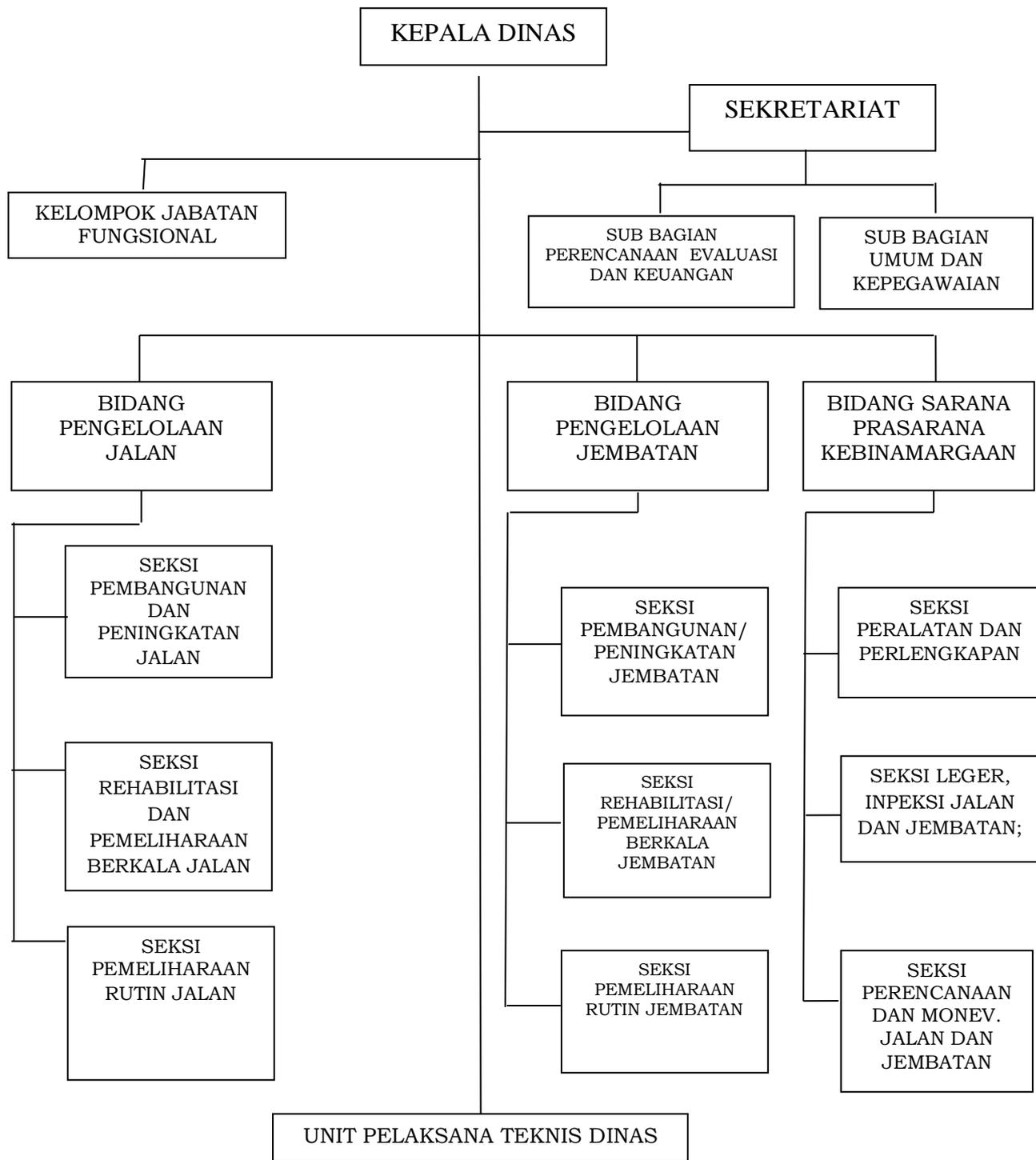
- e. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan peralatan dan perlengkapan;
  - f. menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya peralatan dan perlengkapan;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Peralatan dan Perlengkapan;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan
- a. menyusun rencana teknis kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
  - b. melaksanakan analisis data dan informasi dalam rangka Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
  - c. melaksanakan kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
  - d. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
  - e. menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan
- a. Menyusun Rencana Teknis kegiatan Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan ;
  - b. Melaksanakan analisis data dan informasi dalam rangka Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;
  - c. Melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan ;



- d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;
- e. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci bagan struktur organisasi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut :





### C. Data Umum Organisasi

#### 1. Personil

Sampai dengan akhir bulan Desember 2021, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sebanyak **79** orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak **38** orang dan Pegawai Kontrak sebanyak **41** orang. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan golongan adalah sebagaimana tersebut.

**Tabel 1.1 Data Pegawai di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan**

No	Status Kepegawaian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	PNS	7	18	13	-	38
2	Tenaga Kontrak Kerja					41
<b>Jumlah</b>						<b>79</b>

Data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan Eselon adalah sebagaimana tersebut.

**Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Berdasarkan Eselon**

No	Uraian	Eselon												Staf	Jml
		IIa	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd		
1	Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan	1	-	-	-	1	3	-	-	9	-	-	-	24	38
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>38</b>

Sedangkan Data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut.



**Tabel 1.3 Data Pegawai di Lingkungan  
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN								Jml
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan	-	-	14	-	-	-	16	8	<b>38</b>
<b>Jumlah</b>		-	-	14	-	-	-	16	8	<b>38</b>

## 2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventarisasi, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

**Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana  
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan	1	Luas = 1,105 M <sup>2</sup>
2	Tanah Sawah	1	Luas = 15,0006 M <sup>2</sup>
3	Tanah Jalan	72	Luas = 1,584,376,10
4	Bangunan Laboratorium	1 Unit	Luas = 77 M <sup>2</sup>
5	Bangunan Gudang	1 Unit	Luas = 290 M <sup>2</sup>
6	Bangunan Kantor	1 Unit	Luas = 413 M <sup>2</sup>
7	Gudang Terbuka	2 Unit	Luas = 478 M <sup>2</sup>
8	Bangunan Musholla	1 Unit	Luas = 121 M <sup>2</sup>
9	Panjang Jalan	665,116 Km	
10	Bangunan Jembatan	256 Bh	
11	Bangunan Gorong-gorong :		
	~ Dalam Kota	20 Bh	
	~ Luar Kota ( Bangunan )	137 Bh	
12	Generator	2 Bh	Baik



13	Vibrator Roller	2	Bh	Baik
14	Mobil PICK-UP	7	Bh	6 Baik ; 1 Rusak Ringan
15	Station Wagon	7	Bh	7 Baik
16	Mobil Beban / Truck	9	Unit	9 Baik
17	Sepeda Motor	13	Bh	11 Baik ; 2 Rusak Ringan
18	Walles /Three Whell Roller	9	Bh	9 Baik
19	Mesin Ketik	4	Bh	Rusak Berat
20	Almari Kayu	15	Bh	Rusak Berat
21	Almari Besi	45	Bh	25 Baik ; 12 Rusak Ringan ; 7 Rusak Berat
22	Meja Tulis Kayu	75	Bh	45 Cukup Baik ; 30 Rusak Ringan
23	Meja Komputer	4	Bh	Baik
24	Meja Kerja	38	Bh	Baik
25	Kursi tamu	3	Set	2 Baik ; 1 Kurang baik
26	Kursi Putar	34	Bh	24 Baik, 10 Kurang Baik
27	Kursi Lipat	239	Bh	98 Baik ; 33 Rusak Ringan ; 162 Rusak berat
28	Kipas Angin	1	Bh	Baik
29	Meja Gambar	3	Bh	2 Rusak Berat ; 1 Baik
30	CPU Monitor (original)	5	Bh	Baik
31	PC	32	Unit	7 Baik
32	Note Book	35	Unit	15 Baik, 20 Rusak Berat
33	AC	24	Unit	17 Baik ; 7 Kurang Baik
34	Printer	66	Bh	60 Baik ; 6 Rusak Berat
35	Pesawat Telpn	5	Bh	Rusak Berat
36	Mesin Cetak gambar	1	Bh	Baik
37	Panaboard	1	Bh	Baik
38	Almari Katalog	1	Bh	Baik
39	Almari Pesawat TV	1	Bh	Rusak Ringan
40	Kotak Kunci	1	Bh	Baik



41	Filling Gambar	3	Bh	Rusak Berat
42	Rak Arsip	6	Bh	Baik
43	Bufet	4	Bh	Baik
44	Filing Kabinet	40	Bh	30 Baik ; 10 Rusak Ringan
45	Vidio Record	1	Bh	Baik
46	Faximile	1	Bh	Rusak
47	Amplifier	1	Bh	Baik
48	Warles	1	Bh	Baik
49	Pompa Air	1	Bh	Baik
50	Almari Vibrator	3	Bh	Baik
51	Band Kas	5	Bh	Rusak Ringan
52	Jam Dinding	10	Bh	Baik
53	Stafolt	4	Bh	Baik
54	Televisi	4	Bh	2 Baik ; 2 Rusak Berat
55	White Board	5	Bh	2 Baik ; 3 Rusak Ringan
56	Kamera	35	Bh	12 Baik ; 13 Rusak Ringan ; 10 Rusak
57	USB Stabilise	3	Bh	Baik
58	Handy Came	4	Bh	2 Baik, 2 Rusak Ringan
59	Hummer Tes	3	Bh	Baik
60	Core Drill	5	Bh	Baik
61	Mesin Potong Pohon	5	Bh	4 Baik ; 1 Rusak Ringan
62	Roll Meter	4	Bh	Rusak Ringan
63	Handy Talky	3	Bh	Baik
64	Genset	3	Bh	2 Baik ; 1 Rusak Berat
65	Gps	1	Bh	Baik
66	Alat Laboratotium Bahan Bangunan Konstruksi	2	Unit	Baik
67	Meja Rapat	7	Unit	4 Baik ; 3 Rusak Ringan



### 3. Pembiayaan

Guna mencapai Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2021, dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.5 Anggaran Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan 2021**

NO.	U R A I A N		JUMLAH	KET
I.	<b>APBD Kabupaten</b>			
1.	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp.	<b>4.769.234.125,00</b>	
	Belanja Pegawai	Rp.	4.769.234.125,00	
2.	<b>Belanja Langsung</b>	Rp.	<b>47.931.147.112,00</b>	
	a. Belanja Pegawai	Rp.	730.444.000,00	
	b. Belanja Barang dan jasa	Rp.	13.198.766.640,00	
	c. Belanja Modal	Rp.	34.001.936.472,00	
	<b>J U M L A H</b>	Rp.	<b>52.700.381.237,00</b>	

### D. SISTEMATIKA PENULISAN

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi

#### BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, rencana Kinerja serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

#### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja ta
5. hun ini dengan standart nasional (Jika ada).
6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
8. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

##### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

#### **Visi :**

Visi adalah gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan, visi juga merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi, sehingga Visi dapat memberikan petunjuk kearah mana kita menuju dan seperti apa keadaan yang akan terwujud dimasa yang akan datang.

Visi Kabupaten Lamongan yakni, “ **Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing**” maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai perangkat Daerah merupakan komponen utama bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan masyarakat Lamongan yang Dinamis, mandiri dan responsive terhadap perubahan, dan lebih meningkatkan kesejahteraannya dengan terpenuhinya infrastruktur yang layak dan memadai.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan akan lebih tanggap dalam menyingkapi dinamika perubahan keadaan kearah penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen unit kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan menuju Pemerintahan yang baik, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (Kinerja) organisasi.

#### **Misi :**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi dan sasaran yang ingin dicapai, membawa suatu organisasi kepada suatu fokus,



menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai tujuan.

Dalam penjabaran diatas perumusan Misi, Dinas PU Bina Marga Kabupaten lamongan mengemban tugas pada misi yang ke tiga yakni ;

**“Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan“**

#### **1. Tujuan :**

Mewujudkan Infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat kabupaten lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan bernuansa multidimensional, maka diperlukan manajemen pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran lalu lintas dalam rangka mendukung kegiatan Perekonomian masyarakat..
2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas pedesaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan
3. Meningkatkan kondisi dan fungsi jalan dan jembatan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana kebinamargaan

#### **2. Sasaran dan Indikator Kinerja :**

Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dirumuskan sesuai dengan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, yakni : :

- a. Terwujudnya Pembangunan Jalan dan Jembatan, Gorong-gorong, serta Dinding Penahan Tanah
- b. Terwujudnya, Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Poros Desa dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah.
- c. Terwujudnya Peningkatan, Pemeliharaan jalan dan jembatan, , dan Pengadaan bahan cadangan



- d. Tersedianya data yang akurat guna mendukung perencanaan yang berkualitas.
- e. Terwujudnya sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik.
2. Prosentase Panjang Jalan Poros Desa Strategis dalam Kondisi Baik.
3. Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik.
4. Jumlah Jembatan Poros Desa Strategis dalam Kondisi Baik

**B. Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Program dan Kegiatan :**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

**Table 2.1 Rencana Kerja Tahunan  
Dinas Pu Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat.	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik.	95.22 %	$\frac{405.713}{416.116} \times 100 \% = 97.50 \%$
		Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	80.00 %	$\frac{208}{256} \times 100 \% = 81.15 \%$

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2021. Rencana kinerja



tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2021.

**Program dan Kegiatan :**

<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp	6.501.566.965
<b>Kabupaten/Kota</b>		
• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	35.500.000
• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.789.234.125
• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	0
• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	303.413.240
• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	93.070.600
• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	960.674.000
• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	319.675.000
<b>2. Program Penyelenggaraan Jalan</b>	Rp	46.198.814.272
• Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	46.198.814.272
1) Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategi Pengembangan jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp	95.000000
2) Pengelolaan Leger Jalan	Rp	191.899.500
3) Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp	397.208.000
4) Pembangunan Jalan	Rp	29.913.232.000
5) Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp	1.684.998.000
6) Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	13.526.476.772
7) Pembangunan Jembatan	Rp	140.000.000
8) Pemeliharaan Berkala Jembatan	Rp	0
9) Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp	250.000.000



**Tabel 2.2 Sasaran dan Program  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2021**

No	Sasaran	Program	Indikator Capaian Program	Satuan	Target RPJMD 2021
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat	Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	95.22
			Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80.00

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
  - 2) Pengelolaan Leger Jalan
  - 3) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  - 4) Pembangunan Jalan
  - 5) Pemeliharaan Berkala Jalan
  - 6) Pemeliharaan Rutin Jalan
  - 7) Pembangunan Jembatan
  - 8) Pemeliharaan Rutin Jembatan



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

#### a. KEPALA DINAS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat.	Prosesntase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik.	95,22%
		Prosesntase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik.	80,00%

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan (Sub Kegiatan) Tahun 2021 PAK sebesar  
: Rp. 52.700.381.237,00

#### Program dan Kegiatan :

<b>Program Penunjang Urusan</b>	(7 Kegiatan)	:Rp	6.501.566.965
<b>Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(2 Sub Kegiatan)	:Rp	35.500.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(3 Sub Kegiatan)	:Rp	4.789.234.125
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(2 Sub Kegiatan)	:Rp	0
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	(7 Sub Kegiatan)	:Rp	303.413.240
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1 Sub Kegiatan)	:Rp	93.070.600
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(4 Sub Kegiatan)	:Rp	960.674.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(5 Sub Kegiatan)	:Rp	319.675.000
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	(1 Kegiatan)	:Rp	46.198.814.272
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(8 Sub Kegiatan)	:Rp	46.198.814.272



**b. SEKRETARIS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00 %
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00 %
3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase aparatur yang disiplin	100,00 %
4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100,00 %
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	100,00 %
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	100,00 %
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit Kerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	100,00 %

Jumlah Anggaran Kegiatan (Sub Kegiatan) Tahun 2021 sebesar : Rp. 6.421.566.965,00

**Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	( 2 Sub Kegiatan )	: Rp	35.500.000,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	( 3 Sub Kegiatan )	: Rp	4.789.234.125,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	( 2 Sub Kegiatan )	: Rp	0,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	( 7 Sub Kegiatan )	: Rp	303.413.240,00
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	( 1 Sub Kegiatan )	: Rp	93.070.600,00
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	( 4 Sub Kegiatan )	: Rp	960.674.000,00
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	( 5 Sub Kegiatan )	: Rp	239.675.000,00



**c. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN JALAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan	7.583 M
2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang Jalan yang ditangani</li> <li>• Jumlah TPT yang dibangun</li> </ul>	1.611,5 M 0 unit
3	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan kabupaten	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara secara rutin	56.000 m

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2021 sebesar : **Rp. 45.124.706.772,00**

Sub Kegiatan

1. Pembangunan Jalan : Rp. 29.913.232.000,00
2. Pemeliharaan Berkala Jalan : Rp. 1.684.998.000,00
3. Pemeliharaan Rutin Jalan : Rp. 13.526.476.772,00

**d. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN JEMBATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penanganan jembatan	Unit Jembatan yang Ditingkatkan / Dibangun.	0 Unit
		Unit Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala.	0 Unit
		Unit Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin.	10 Unit

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2021 sebesar : Rp. 390.000.000,00

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Jembatan : Rp. 140.000.000,00
2. Pemeliharaan Berkala Jembatan : Rp. 0,00
3. Pemeliharaan Rutin Jembatan : Rp. 250.000.000,00



e. KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	2 Kegiatan
		Informasi kondisi jalan dan jembatan	5 Kegiatan
		Informasi kondisi jalan dan jembatan	4 Kegiatan
		Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	3 Unit

Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 sebesar : Rp. **764.107.500,00**

Program dan Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ( 2 Kegiatan ) : Rp 95.000.000,00
2. Pengelolaan Leger Jalan ( 4 Kegiatan ) : Rp 191.899.500,00
3. Survey Kondisi Jalan/Jembatan ( 5 Kegiatan ) : Rp 397.208.000,00
4. Pengadaan Alat-Alat Berat ( 3 Unit ) : Rp 80.000.000,00



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang kebinamargaan dapat dilihat dari meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan meningkatnya Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.

Secara garis besar dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada Perencanaan Strategis untuk tahun 2021 dari segi Output seluruhnya telah dapat dilaksanakan sedangkan dari segi Outcome beberapa indikator belum dapat dihitung. Hal ini karena belum tersedianya data kinerja, yang saat ini masih dalam taraf pengembangan ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2021

##### 1. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2021

Pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Adapun Tabel Pencapaian Kinerja disajikan sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2021  
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Th. 2021 (%)
<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat.</b>	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik.	95,22	<b>97,50</b>	<b>102,39</b>
	Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	80,00	<b>81,15</b>	<b>101,43</b>



Dari table di atas terlihat bahwa capaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 102,39% dan capaian prosentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 101,43%, hal ini menunjukkan tercapainya target indikator sasaran kinerja tahun 2021 dengan realisasi sebesar 97,50% dan 81,15% yang melampaui target.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Keberhasilan suatu Institusi dalam mengemban tugas dapat diukur dari sejauh mana institusi tersebut dapat merealisasikan program - programnya sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan kinerja.

Indikator dan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020 (%)	Capaian 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat.	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik.	92,93	100.04	97,50	102,39
		Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	78,91	100.11	81,15	101,43



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keseriusan Dinas PU Bina marga dalam membangun jalan dan jembatan dalam kondisi baik.

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Priode RPJMD/RENSTRA:**

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :



**Tabel 3.3 Capaian Dan Target Kinerja  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2021**

**Visi** : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing  
**Misi 3** : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			PD yang menanganikan urusan
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian	1	Prosentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Km)}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten (Km)}} \times 100\%$	%	85,89	90,71	88,22	90,62	90,56	92,38	<b>92,89</b>	<b>92,93</b>	95,22	<b>97,5</b>	<b>102,39</b>	Dinas PU Bina Marga
		2	Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (unit)}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Seluruhnya (unit)}} \times 100\%$	%	74,51	76,43	75,69	78,6	77,25	77,6	<b>78,82</b>	<b>78,91</b>	80,00	<b>81,15</b>	<b>101,43</b>	



**SASARAN 1** *Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat*

**Indikator Kinerja 1** **Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 3 (tiga) sub kegiatan yakni pembangunan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	95.22	97.50

Peningkatan panjang Jalan pada tahun 2021 adalah mencapai 97.50% dari target 95.22%. Sebagaimana di pada tabel diatas.

**SASARAN 1** *Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat*

**Indikator Kinerja 2** **Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik**

Prosentase jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik merupakan Indikator Kinerja Utama guna pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 3 (tiga) sub kegiatan yakni pembangunan jembatan, pemeliharaan berkala jembatan dan pemeliharaan rutin jembatan.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80.00	81.15

Peningkatan Jumlah Jembatan Kabupaten pada tahun 2021 adalah mencapai 81.15% dari target 80.00 %. Sebagaimana di pada tabel diatas.



#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Realisasi kinerja ini membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan realisasi nasional. Namun di tahun 2021 ini nihil atau tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Indikator kinerja sasaran Dinas PU Bina Marga yaitu **“Prosentase Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dan Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik”** pada tahun 2021 masuk dalam kategori ”sangat berhasil” dengan target 95.22% dan terealisasi sebesar 97.5% serta target jembatan kabupaten dalam kondisi baik 80.00% dan terealisasi sebesar 81.15%. Untuk Indeks Insfrakstuktur Jalan, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 87.01, melampaui target yang di tetapkan sebesar 85.06 dan jika di banding realisasi kinerja tahun 2020 meningkat adapun indeks Insfrakstuktur jembatan, realisasi tahun 2021 sebesar 85.18 melampaui target yang di tetapkan sebesar 83.97, hal ini di dukung oleh Program penyelenggaraan jalan dengan kegiatan program penyelenggaraan jalan serta 9 (Sembilan) sub kegiatan, yaitu Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategi Pengembangan jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pengelolaan Leger Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jembatan, dan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

Adapun hal-hal yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :

- a. Perencanaan teknis yang matang dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program penyelenggaraan jalan;
- b. Pelaksanaan kegiatan tutup lobang yaitu segera menambal lubang yang ada di Jalan Kabupaten sehingga tidak memperparah kerusakan jalan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan yang optimal sebagai pendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, sehingga jalan menjadi lebih layak untuk dilalui.



Untuk mempertahankan keberhasilan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah langkah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi program penyelenggaraan jalan sesuai skala prioritasnya;
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target dan realisasi indikator kinerja;
- c. Koordinasi yang baik antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penanganan jalan agar tetap dalam kondisi baik;
- d. Pengadaan alat berat untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tentang peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan.

#### **6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :**

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mengharuskan untuk melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan personil yang tersedia, ketimpangan jumlah personil yang mempunyai kompetensi teknis memadai dengan beban kerja yang masih cukup besar dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan baik perencanaan maupun pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan menekan beban pembiayaan.

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara terpusat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan sistim elektronik memungkinkan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa yang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan (Kontrak). Demikian juga pengawasan yang semakin baik akan memberikan efisiensi sumber daya dari semua aspek pekerjaan.

#### **7. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja :**

Dengan melihat hasil dari Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) dan Evaluasi terhadap capaian sasaran dengan cara Pengukuran Pencapaian Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari Input, Output dan Outcome dengan hasil yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan menunjukkan capaian dengan makna Baik.



Dari hasil tersebut seluruh kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dikarenakan kerja keras dan dukungan dari stakeholder dengan tetap memaksimalkan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

**Prestasi :**

Dilihat dari hasil Pengukuran Kinerja ( PK ) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat mengevaluasi Indikator *Outcome* sebagai berikut, yakni :  
Program Penyelenggaraan Jalan dengan 1 Kegiatan dan 9 Sub kegiatan masing-masing mencapai prestasi 100 %.

**B. Realisasi Anggaran**

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Adapun Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2021 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 52.700.381.237,- ( Lima Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp. 41.302.907.709,74 ( Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah Tujuh Puluh Empat ) atau 78,37% adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada Tahun 2021 dengan alokasi dana dan realisasi anggaran sebagai berikut :



**Tabel 3.4 Realisasi Anggaran  
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2021**

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSE NTASE (%)
1					2	3	4	5
03					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>52.700.381.237</b>	<b>41.302.907.709,89</b>	<b>78,37</b>
03	05	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.501.566.965</b>	<b>6.182.399.058</b>	<b>95,09</b>
03	05	01	2.01		<b>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	35.500.000	30.528.100	<b>85,99</b>
03	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000	23.028.800	<b>82,25</b>
03	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	7.499.300	<b>99,99</b>
03	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.789.234.125</b>	<b>4.662.251.958</b>	<b>97,35</b>
03	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.769.234.125	4.642.252.258	<b>97,34</b>
03	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	9.999.700	<b>100,00</b>
03	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	10.000.000	<b>100,00</b>
03	05	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
03	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	<b>0,00</b>
03	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	<b>0,00</b>



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSE NTASE (%)
1					2	3	4	5
03	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>303.413.240</b>	<b>298.335.700</b>	<b>98,33</b>
03	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.757.100	32.755.100	<b>99,99</b>
03	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.368.240	86.900.000	<b>95,11</b>
03	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.842.600	30.839.500	<b>99,99</b>
03	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.809.900	52.588.100	<b>99,58</b>
03	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	29.998.000	<b>99,99</b>
03	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	52.827.400	52.545.000	<b>99,47</b>
03	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.808.000	12.710.000	<b>99,23</b>
03	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>93.070.600</b>	<b>92.312.000</b>	<b>99,18</b>
03	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	93.070.600	92.312.000	<b>99,18</b>
03	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>960.674.000</b>	<b>790.481.348</b>	<b>82,28</b>
03	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.480.000	5.480.000	<b>100,00</b>
03	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.750.000	98.563.140	<b>46,99</b>
03	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	15.000.000	<b>100,00</b>
03	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	730.444.000	671.438.208	<b>91,92</b>



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSE NTASE (%)
1					2	3	4	5
03	05	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>319.675.000</b>	<b>308.489.952</b>	<b>96,50</b>
03	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	13.976.952	<b>99,84</b>
03	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.675.000	150.683.000	<b>93,78</b>
03	05	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	80.000.000	78.830.000	<b>98,54</b>
03	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	65.000.000	<b>100,00</b>
03	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	<b>0,00</b>
03	05	10			<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>46.198.814.272</b>	<b>35.120.508.651,89</b>	<b>76,02</b>
03	05	10	2.01		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>46.198.814.272</b>	<b>35.120.508.651,89</b>	<b>76,02</b>
03	05	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	95.000.000	86.790.000	<b>91,36</b>



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSE NTASE (%)
1					2	3	4	5
03	05	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	191.899.500	187.675.000	<b>97,80</b>
03	05	10	2.01	04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	397.208.000	371.339.900	<b>93,49</b>
03	05	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	29.913.232.000	19.331.517.542,94	<b>64,63</b>
03	05	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.684.998.000	1.633.804.113,80	<b>96,96</b>
03	05	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	13.526.476.772	13.149.741.616,15	<b>97,21</b>
03	05	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	140.000.000	136.860.500	<b>97,76</b>
03	05	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	250.000.000	222.779.979	<b>89,11</b>

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) , mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah pada Dinas Pu Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana dalam APBD 2021 pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang di emban oleh Dinas PU Bina Marga kabupaten lamongan, namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program/ kegiatan yang di laksanakan, demikian juga untuk mengukur seberapa besar tupoksi yang telah dilaksanakan dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan.

❖ **Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direalisasikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 52.700.381.237 dan terealisasi sebesar Rp. 41.302.907.709,89 atau 78,37%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.397.473.527,11. Adapun rincian anggaran pembangunan sebagai berikut :



## **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.500.000,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 30.528.100,00 atau 85,99 %. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 2 ( Dua ) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.028.800,00 Atau 82,25 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.499.300,00 Atau 99,99 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.

### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.789.234.125,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 4.662.251.958,00 atau 97,35 %. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 3 ( Tiga ) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.642.252.258,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.642.252.258,00 Atau 97,34 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.999.700,00 Atau 100 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 Atau 100 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.

### **3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran dihapuskan dikarenakan terdapat *Refocusing* atau pengurangan anggaran disebabkan oleh adanya dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami Defisit Anggaran dan terdiri dari 2 ( Dua ) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- Sub Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



#### **4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 303.413.240,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 298.335.700,00 atau 98,33 %. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 7 ( Tujuh ) Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 32.757.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 32.755.100,00 Atau 99,99 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 91.368.240,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.900.000,00 Atau 95,11 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.842.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.839.500,00 Atau 99,99 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 52.809.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.588.100,00 Atau 99,58 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 29.998.000,00 Atau 99,99 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 52.827.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 52.545.000,00 Atau 99,47 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 12.808.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.710.000,00 Atau 99,23 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.

#### **5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 93.070.600,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 92.312.000,00 atau 99,18 %. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 1 ( Satu ) Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 93.070.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.312.000,00 atau 99,18 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.



## **6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 960.674.000,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 790.481.348,00 atau 82,28 %. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 4 ( Empat ) Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.480.000,00 atau 100 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 209.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 98.563.140,00 atau 46,99 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 730.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 671.438.208,00 atau 91,92 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.

## **7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 319.675.000,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 308.489.952,00 atau 96,5 %. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 5 ( Lima ) Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.976.952,00 atau 99,84 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 160.675.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 150.683.000,00 atau 93,78 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 78.830.000,00 atau 98,54 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.



- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 65.000.000,00 atau 100 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, Dengan Alokasi anggaran dihapuskan dikarenakan terdapat *Refocusing* atau pengurangan anggaran disebabkan oleh adanya dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pemerintah Kabupaten Lamongan mengalami Defisit Anggaran.

### **Program Penyelenggaraan Jalan**

#### **1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 46.198.814.272,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 35.120.508.651,89 atau 76,02 %. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 8 ( Delapan ) Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 86.790.000,00 atau 91,36 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 2 ( Dua ) Paket pekerjaan yaitu :
  1. Perencanaan Umum (Pra desain) Jalan, Jembatan dan Utilitas Wilayah Selatan
  2. Perencanaan Umum (Pra desain) Jalan, Jembatan dan Utilitas Wilayah Tengah
- Pengelolaan Leger Jalan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 191.899.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 187.675.000,00 atau 97,80 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 4 ( Empat ) Paket pekerjaan yaitu :
  1. Pembuatan Leger Ruas Jalan Basuki Rahmad
  2. Pembuatan Leger Ruas Jalan Mastrip
  3. Pembuatan Leger Ruas Jalan Sumberwudi – Karanggeneng
  4. Pengadaan Inspeksi Jalan



- Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 397.208.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 187.675.000,00 atau 93,49 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 5 ( Lima ) Paket pekerjaan yaitu :
  1. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jalan) Wilayah Selatan
  2. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jalan) Wilayah Tengah
  3. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jalan) Wilayah Utara
  4. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jembatan) Wilayah Selatan dan Tengah
  5. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jembatan) Wilayah Utara dan Tengah 2
- Pembangunan Jalan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 29.913.232.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.331.517.542,94 atau 64,63 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 3 ( Tiga ) Paket pekerjaan yaitu :
  1. Peningkatan jalan Karangembang -Gendongkulon ( CBC )
  2. Peningkatan jalan Tikung - Sumberkerep
  3. Peningkatan jalan Tunjungmekar - Sambopinggir
- Pemeliharaan Berkala Jalan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.684.998.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.633.804.113,80 atau 96,96 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 10 ( Sepuluh ) Paket pekerjaan yaitu :
  1. Pemeliharaan berkala ruas jalan Kembangbahu – Kalipang ( Paving )
  2. Pemeliharaan berkala ruas jalan Menengai – Wates ( Paving )
  3. Pemeliharaan berkala ruas jalan Soko – Dagan ( CBC dan Penahan Tanah )
  4. Pemeliharaan berkala ruas jalan Sugio - Tlanak ( CBC )
  5. Pemeliharaan berkala jalan Sukorame - Slaji ( CBC )
  6. Pemeliharaan berkala jalan Sumberwudi - Maduran ( CBC )
  7. Pemeliharaan berkala jalan Sarirejo – Jatirembe  
( Ds. Sepat , Dsn. Tambakmenjangan )
  8. Pemeliharaan berkala jalan Kinameng
  9. Pemeliharaan berkala Jalan Gampang – Petiin



10. Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Ruas Jalan Tunjungmekar - Sambopinggir (Sisa Pembayaran Tahun 2020)
- Pemeliharaan Rutin Jalan. Pemeliharaan Berkala Jalan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 13.526.476.772,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.149.741.616,15 atau 97,21 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 59 ( Lima Puluh Sembilan ) Paket pekerjaan yaitu :
1. Pengadaan Aspal Ruas Jalan Kabupaten
  2. Pengadaan Bahan Deltu Bahu Jalan
  3. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Bakalrejo – Gondanglor
  4. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Bluluk – Sukorame
  5. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dalam Kota
  6. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Deket – Soko
  7. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Deket – Tambakboyo
  8. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dradah – Bluluk
  9. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dradah – Kedungpring
  10. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dumpi – Sukobendu
  11. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Gampang - Peti'in
  12. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Gembong – Dempel
  13. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kalen – Kedungpring
  14. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Karangkembang – Gendongkulon
  15. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kedungdadi – Moropelang
  16. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kedungpring – Sukobendu
  17. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kembangbahu – Kalipang
  18. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kembangbahu – Sukobendu
  19. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kiringan – Dibee
  20. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Lamongrejo – Garung
  21. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Lamongrejo – Slaji
  22. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Laren – Blimbing
  23. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Lonjong – Mendolo
  24. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Made – Plosowahyu
  25. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Mantup – Ayamalas
  26. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Mantup – Sambeng
  27. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Menengai – Wates



28. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Ngasemlembang – Kedungmentawar
29. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Ngimbang – Bluluk
30. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Paciran – Godog
31. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Pagerwojo – Plembon
32. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Peti'in – Banjarwati
33. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Plembon – Sugio
34. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Plembon – Sukodadi
35. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Pucuk – Sekaran
36. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Pule – Sarirejo
37. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Ring Road Deket – Tambakboyo
38. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Samebeng – Garung
39. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sambeng – Ngimbang
40. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sarirejo – Jatilembe
41. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sekaran – Laren
42. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Soko – Dagang
43. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Soko – Karangbinangun
44. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Solokuro – Dadapan
45. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sugio – Tlanak
46. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukodadi – Sumberwudi
47. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukorame – Sembung
48. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukorame – Slaji
49. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sumberwudi – Karanggeneng
50. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sumberwudi – Maduran
51. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sumberwudi – Tunjungmekar
52. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tanjung – Songowareng
53. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tikung – Kembangbahu
54. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tlanak – Kedungpring
55. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tlanak – Nguwok
56. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tunjungmekar – Sambopinggir
57. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Turi – Kiringan
58. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan & Semak – Semak
59. Pembayaran Tahun 2020 Jalan Poros Desa, gorong-gorong, berkala jalan



- Pembangunan Jembatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 140.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 136.860.500,00 atau 97,76 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 2 ( Dua ) Paket pekerjaan yaitu :
  1. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 1
  2. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 2
- Pemeliharaan Rutin Jembatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 222.779.979,00 atau 89,11 % Dengan Prosentase Fisik 100 %. Terdiri dari 4 ( Empat ) Paket pekerjaan yaitu :
  1. Pengadaan Bahan Laston
  2. Pengadaan Bahan Lokal
  3. Pengadaan Upah Tenaga Kerja
  4. Pengadaan Bahan Bakar/Pelumas

**Pendapatan Dinas Pu Bina Marga**

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Sewa Alat Berat	85.000.000	75.535.000	85.000.000	85.190.000
2	Penjualan Pohon	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>90.000.000</b>	<b>80.535.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.190.000</b>



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2021 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat kinerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan
2. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan
3. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/profesionalismenya
4. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak.
5. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.



## B. Saran

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Lamongan, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan Propinsi, maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana ( sumber daya manusia Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan ) agar lebih profesional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Lamongan, 28 Januari 2022

KEPALA DINAS PU BINA MARGA  
KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, ST., MM.

Pembina Tingkat I  
NIP. 1974093 200112 1 005



**LAMPIRAN**

### MATRIKS RENCANA STRATEGIS

**Instansi** : DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN  
**Visi** : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing  
**Misi 3** : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan  
**Tujuan** : Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

SASARAN	INDIKATOR		TAHUN DASAR		TARGET						STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		Ket
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Capaian	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat	1.1	Meningkatnya Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik.	85,89%	83,56%	85,89%	88,22%	90,56%	92,89%	95,22%	97,50%	Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengawasan dengan menggunakan konsultan yang berpengalaman dan berkompeten dibidangnya	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PU. Bina Marga
	2.1	Meningkatnya Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	74,51%	73,33%	74,51%	75,69%	77,25%	78,82%	80,00%	81,15%			

KEPALA DINAS PU BINA MARGA  
KABUPATEN LAMONGAN



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN**

**SKPD : DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN**  
**Tahun Anggaran : 2021**

SASARAN			TAHUN 2021	
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik.	95,22%	97,50%
		Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik	80,00%	81,15%

**Jumlah Anggaran Tahun 2021 Sebesar Rp 52.700.381.237**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021 Sebesar Rp 41.302.907.709,89**

Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
<b>1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 6.501.566.965</b>	<b>Rp 6.182.399.058</b>
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.500.000	30.528.100
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.789.234.125	Rp 4.662.251.958
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	Rp -
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 303.413.240	Rp 298.335.700
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 93.070.600	Rp 92.312.000
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 960.674.000	Rp 790.481.348
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 319.675.000	Rp 308.489.952
<b>2 Program Penyelenggaraan Jalan</b>	<b>Rp 46.198.814.272</b>	<b>Rp 35.120.508.651,89</b>
- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 46.198.814.272	Rp 35.120.508.651,89
<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp 52.700.381.237</b>	<b>Rp 41.302.907.709,89</b>



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUJARWO, ST., MM.

Jabatan : Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

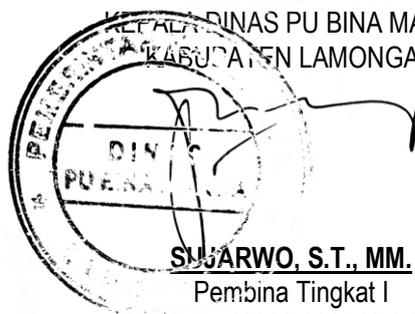
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Oktober 2021

PIHAK KEDUA  
BUPATI LAMONGAN

  
Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PU BINA MARGA  
KABUPATEN LAMONGAN

  
SUJARWO, S.T., MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740930 200112 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian masyarakat.	Prosentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik.	95,22 %
		Prosentase Jumlah Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik.	80,00 %

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan (Sub Kegiatan) Tahun 2021 PAK sebesar : Rp. 52.700.381.237,00

**Program :**

<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	(7 Kegiatan)	:Rp	6.501.566.965
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(2 Sub Kegiatan)	:Rp	35.500.000
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(3 Sub Kegiatan)	:Rp	4.789.234.125
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(2 Sub Kegiatan)	:Rp	0
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	(7 Sub Kegiatan)	:Rp	303.413.240
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1 Sub Kegiatan)	:Rp	93.070.600
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(4 Sub Kegiatan)	:Rp	960.674.000
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(5 Sub Kegiatan)	:Rp	319.675.000
<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	(1 Kegiatan)	:Rp	46.198.814.272
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(8 Sub Kegiatan)	:Rp	46.198.814.272

Lamongan, Oktober 2021

PIHAK KEDUA  
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS PU BINA MARGA  
KABUPATEN LAMONGAN



SUJARWO, S.T., MM.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19740930 200112 1 005

# INOVASI "SIRKEL" (SISTEM INFORMASI RESPONS KELUHAN JALAN)

## DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB. LAMONGAN

---

### Maksud

Untuk mempercepat Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penanganan Jalan Jembatan

### Tujuan

Meningkatkan Kualitas Penanganan dan Pemeliharaan Jalan di Kabupaten secara cepat dan tepat sasaran

### Manfaat

Tanggap terhadap Laporan/ Aduan Masyarakat mengenai kerusakan masyarakat  
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam memberikan Informasi Kerusakan Jalan.

## INOVASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB. LAMONGAN

---

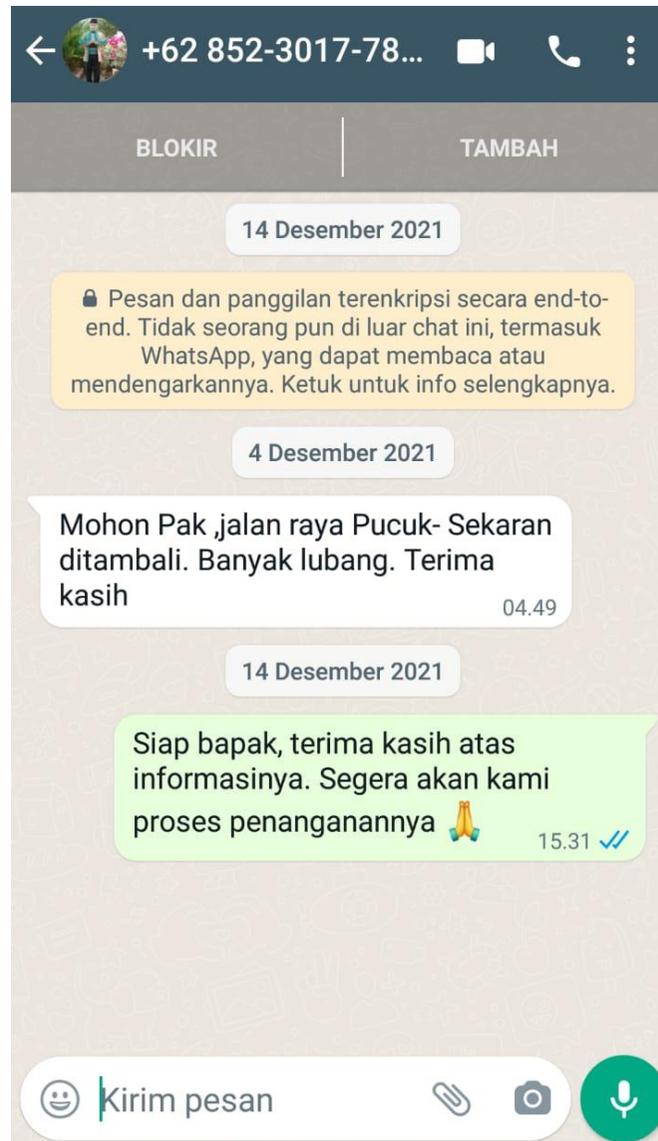
**"SIRKEL"**  
SISTEM INFORMASI RESPONS  
KELUHAN JALAN

**Call Center (WhatsApp)**  
082142565600  
& Instagram Bina Marga

Percepatan Penanganan dan  
Pemeliharaan Jalan

Percepatan Penanganan  
Jalan, akan memperkecil  
Tingkat Kerusakan Jalan

# WhatsApp



# Instagram Binamarga (Direct Message)

<  **Aziizi Yulfien Prima**  
Active 2h ago



Lokasi jalan pahlawan selatan sekitar depan gudang elpiji laju jaya sampai pasar sidoarjo parah banget pak mohon ditindak lanjuti

Tap and hold to react



 Message...   

<  **Aziizi Yulfien Prima**  
Active 2h ago



Tap and swipe any message to reply

MON 4:48 PM

Baik mba, terimakasih atas informasinya. Akan segera ditindak lanjuti. Karena skr masih proses penanganan jl.sunan giri 🙏

Seen Monday

 Message...   

< **Comments** ...

 **binamarga\_Img** Bapak Kepala Dinas PU Bina Marga dan tim secara langsung melakukan survey kondisi jalan rusak dalam rangka perencanaan JAMULA (Jalan Mantap Alus Lamongan) 2022.

Tak lupa dan selalu, mohon doa dan support demi mensukseskan JAMULA.. 🙏🙏

#menujujamula #lamonganmenujukejayaan #lamonganmegilan #ASNberakhlak #banggamelayanibangsa

3w See Translation

 **fathurrohim.suhadi** mantap Jamula bersama Bapak Sujarwo

1w Reply

 **sujito.sujito.9066** Kec,sukorame jg mohon disurfei pak....jl.rya sukorame-kedungadem,jl,rya sukorame-kabuh parah...

3w Reply

 **hidin\_mc\_laptop** Pucuk-Blimbing,pak. Parah pak. Sudah bolak balek Pelajar dan orang tua, kejeplong.

3w Reply



 Add a comment as binamarga\_1...

# PIAGAM PENGHARGAAN

## DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KAB. LAMONGAN

---

